

Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di MTs As'ad Olak Kemang Kota Jambi

Sri Kadarsih¹, Fahrizal Nover²

^{1,2} Pascasarjana, UIN STS Jambi

srikadarsih1@gmail.com

Corresponding Author: Author¹

Abstrak indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di MTs As'ad Olak Kemang Kota Jambi, dengan fokus pada proses perumusan, implementasi, dan dampaknya terhadap proses pembelajaran serta pembentukan karakter siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di MTs As'ad dirumuskan secara partisipatif dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan prinsip manajemen berbasis sekolah. Implementasi kebijakan dilakukan melalui sistem pendidikan terpadu yang menekankan keseimbangan antara aspek akademik dan karakter spiritual. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan latar belakang siswa yang beragam, kebijakan yang diterapkan terbukti meningkatkan mutu pendidikan dan pembentukan karakter siswa. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang lebih efektif, adaptif, dan kontekstual dalam lingkungan madrasah berbasis pesantren.

Kata Kunci: *Kebijakan Pendidikan Islam, Madrasah, Manajemen Berbasis Sekolah, Pendidikan Karakter, Implementasi Kebijakan.*

Abstract English

This study aims to analyze the Islamic education policy implemented at MTs As'ad Olak Kemang in Jambi City, focusing on the formulation, implementation, and impact of the policy on the learning process and students' character development. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that educational policies at MTs As'ad are formulated through participatory processes that integrate Islamic values and principles of school-based management. The implementation is carried out through an integrated education system that balances academic excellence and spiritual character building. Despite challenges such as limited resources and diverse student backgrounds, the policies have proven effective in enhancing educational quality and student character. These findings are expected to contribute to the development of more effective, adaptive, and contextual Islamic education policies, especially within pesantren-based madrasah environments.

Keywords: *Islamic Education Policy, Madrasah, School-Based Management, Character Education, Policy Implementation.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban dan masa depan suatu bangsa (Purwananti, 2016). Dalam konteks pendidikan Islam, madrasah memegang peranan strategis sebagai institusi yang tidak hanya bertugas mentransfer

ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keislaman dan akhlak mulia secara menyeluruh. Madrasah Tsanawiyah (MTs), sebagai jenjang pendidikan menengah pertama dalam sistem pendidikan formal di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi yang unggul secara intelektual, spiritual, dan emosional (Rohani et al., 2021).

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, madrasah telah lama berkontribusi dalam mencetak generasi Muslim yang moderat, berakhlak baik, serta memiliki daya saing dalam berbagai bidang. Dengan perpaduan antara kurikulum nasional dan pendidikan agama, madrasah hadir sebagai alternatif pendidikan yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan spiritual (Halim et al., 2019). Namun, dalam menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, madrasah dituntut untuk terus berinovasi dan melakukan penyesuaian melalui kebijakan-kebijakan pendidikan yang relevan dan kontekstual.

Kebijakan pendidikan memiliki peran penting dalam mengarahkan jalannya proses pendidikan di madrasah. Kebijakan ini mencakup perumusan tujuan, strategi pengajaran, manajemen sumber daya, pembinaan karakter, hingga evaluasi mutu pendidikan. Dengan demikian, kebijakan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan refleksi dari visi dan arah pengembangan lembaga pendidikan. Kualitas kebijakan pendidikan akan sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sistem pengajaran yang adaptif, dan pembinaan karakter yang berkesinambungan (Halim, 2020).

MTs As'ad Olak Kemang Kota Jambi merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki keunikan dalam pendekatannya. Sebagai bagian dari Pondok Pesantren As'ad yang telah berdiri sejak tahun 1951, MTs As'ad mengusung sistem integratif antara pendidikan pesantren dan madrasah formal. Dengan sistem boarding school, madrasah ini mampu memberikan pembinaan intensif baik dalam aspek akademik maupun spiritual, sehingga kebijakan yang diterapkan di lingkungan MTs As'ad memiliki karakteristik yang khas dan relevan dengan kebutuhan santri yang tinggal di asrama.

Kebijakan-kebijakan internal MTs As'ad mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan kurikulum, disiplin santri, tata kelola kelembagaan, hingga program penguatan karakter. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut dirancang (Firdaus et al., 2023), diimplementasikan, dan dievaluasi. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan pendidikan serta memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di MTs As'ad Olak Kemang Kota Jambi. Fokus penelitian mencakup perumusan, pelaksanaan, serta dampak kebijakan terhadap proses pembelajaran dan pembentukan karakter siswa. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang lebih efektif, adaptif, dan kontekstual, khususnya dalam lingkungan madrasah berbasis pesantren.

LANDASAN TEORI

Teori Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan suatu instrumen strategis yang dirancang untuk mengatur arah, proses, dan hasil dari sistem pendidikan secara menyeluruh (Halim, 2022). Menurut Riant Nugroho (2020), kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan, terdiri atas tiga komponen utama, yaitu: perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Ketiga komponen ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas kebijakan dalam menjawab persoalan di lapangan. Suatu kebijakan dikatakan baik apabila tidak hanya normatif, melainkan juga fungsional dan aplikatif—artinya dapat diterapkan secara nyata serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks ini, peran pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun institusi pendidikan, sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak bersifat simbolik semata, tetapi mampu menjadi solusi yang kontekstual dan berkelanjutan (Saputro, 2023).

Dalam konteks madrasah, kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khas karena harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan tuntutan zaman, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai lembaga pendidikan berbasis agama, madrasah tidak hanya dituntut mencerdaskan siswa secara intelektual, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral. Oleh karena itu, perumusan kebijakan di madrasah harus mempertimbangkan kebutuhan riil siswa dan lingkungan sekitar, serta melibatkan partisipasi kolektif dari seluruh elemen madrasah—kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, siswa, hingga orang tua (Nasution et al., 2024). Selain itu, nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat sekitar perlu diakomodasi agar kebijakan bersifat inklusif dan membumi. Prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas juga harus menjadi dasar dalam setiap proses kebijakan agar dapat dipertanggungjawabkan secara profesional maupun moral.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan di madrasah harus dirancang secara holistik dan responsif terhadap dinamika internal maupun eksternal lembaga. Landasan teoretis yang dikemukakan Riant Nugroho memberikan kerangka analitis yang jelas untuk memahami pentingnya integrasi antara visi ideal pendidikan dan kondisi nyata di lapangan. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya terletak pada ketepatan perumusannya, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dengan melibatkan semua unsur madrasah secara partisipatif dan kontekstual.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan pendekatan desentralisasi pendidikan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah atau madrasah dalam mengelola seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan secara mandiri, demokratis, dan partisipatif. Menurut Sahlan (2022), kepala sekolah atau madrasah memiliki peran sentral sebagai pemimpin transformasional yang harus mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan lembaga (Ruslan et al., 2023). Kepemimpinan yang adaptif dan visioner diperlukan agar

madrasah mampu menjawab tantangan pendidikan yang terus berkembang. Dalam konteks MBS, tanggung jawab manajemen tidak hanya dibebankan pada pimpinan, tetapi juga didistribusikan kepada semua elemen pendidikan agar tercipta sistem pengelolaan yang kolektif dan berkelanjutan.

Model MBS mendorong terjadinya kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar dalam setiap pengambilan keputusan penting di madrasah. Keterlibatan semua pihak ini menjadikan kebijakan dan program madrasah lebih relevan, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lingkungan setempat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap lembaga (Sapina et al., 2022). Namun, keberhasilan penerapan MBS sangat bergantung pada kapasitas manajerial kepala madrasah dan tenaga kependidikan lainnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi kepemimpinan dan manajerial menjadi salah satu kunci utama dalam implementasi efektif MBS di madrasah.

Secara keseluruhan, Manajemen Berbasis Sekolah memberikan ruang bagi madrasah untuk berkembang secara otonom sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokalnya. Pendekatan ini memperkuat tata kelola kelembagaan berbasis partisipasi dan kolaborasi, sekaligus mendorong efisiensi pengelolaan sumber daya. Agar implementasi MBS berjalan optimal, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan Islam yang holistik dan berkualitas.

Teori Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona (1991) merupakan proses sadar yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kerja sama, dan kepedulian sosial kepada peserta didik. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pengembangan aspek kognitif, tetapi juga menekankan pentingnya pembentukan sikap dan perilaku sebagai bagian dari kepribadian yang utuh (Iqbal et al., 2024; Mukhlis, 2024). Dalam pendekatan Lickona, pendidikan karakter harus menyentuh dimensi berpikir, merasa, dan bertindak (*knowing, feeling, acting*) secara seimbang agar siswa tidak hanya tahu tentang nilai-nilai moral, tetapi juga menginternalisasi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan karakter menjadi bagian integral dari sistem pembelajaran yang menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan moral universal. Nilai-nilai tersebut diinternalisasikan melalui kegiatan kurikuler, seperti pelajaran akidah-akhlak dan fiqih, serta kegiatan ekstrakurikuler dan kehidupan berasma yang mengedepankan pembiasaan perilaku positif. Keteladanan guru, pola interaksi sosial, dan suasana religius madrasah berperan penting dalam membentuk lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus dirancang secara terstruktur dengan indikator keberhasilan yang terukur, serta dievaluasi secara berkala untuk menjamin keberlangsungan dan efektivitasnya.

Pendidikan karakter dalam perspektif Thomas Lickona merupakan fondasi utama dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga

berakhlak mulia dan bertanggung jawab secara sosial. Di madrasah, pendekatan ini sangat relevan karena selaras dengan tujuan pendidikan Islam yang menekankan keselarasan antara ilmu, iman, dan amal. Untuk itu, pendidikan karakter perlu diimplementasikan secara holistik dan konsisten dalam seluruh aspek kehidupan madrasah, baik melalui pengajaran formal, pembinaan informal, maupun pembiasaan harian.

Teori Implementasi Kebijakan (Mazmanian dan Sabatier)

Mazmanian dan Sabatier (1983) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan, (2) kualitas perangkat hukum dan instrumen pelaksanaannya, serta (3) kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang mendukung. Ketiga komponen ini harus terpenuhi secara sinergis agar kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Kejelasan tujuan sangat penting untuk menghindari multitafsir, sementara perangkat hukum harus memberikan arahan yang operasional. Sementara itu, dukungan lingkungan sosial-politik menjadi kunci dalam mendorong keberterimaan dan kelancaran proses implementasi (Hartanto & Halim, 2024).

Dalam konteks pendidikan di madrasah, teori ini sangat relevan ketika diterapkan pada kebijakan-kebijakan internal seperti aturan kedisiplinan siswa, integrasi kurikulum agama dan umum, serta sistem asrama. Implementasi kebijakan semacam ini tidak hanya membutuhkan dokumen tertulis, tetapi juga memerlukan prosedur pelaksanaan yang rinci, pelatihan bagi pelaksana, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang konsisten. Selain itu, kondisi internal madrasah seperti kesiapan SDM, budaya organisasi, dan dukungan orang tua juga menjadi bagian dari konteks sosial yang memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi.

Teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier memberikan kerangka penting dalam menganalisis bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan dapat diterapkan secara efektif dalam konteks madrasah. Keberhasilan kebijakan pendidikan di madrasah tidak hanya bergantung pada kualitas rumusannya, tetapi juga pada sejauh mana prosedur pelaksanaannya jelas, instrumennya memadai, dan lingkungan sosial-politik mendukung. Tanpa keselarasan antara desain kebijakan dan praktik di lapangan, maka tujuan pendidikan yang ingin dicapai berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Teori Analisis Kebijakan Publik

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai "apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Dalam konteks kelembagaan seperti madrasah, definisi ini memberikan pemahaman bahwa pengambilan kebijakan merupakan proses selektif yang mencerminkan keputusan strategis—baik dalam bentuk tindakan maupun kelalaian. Artinya, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan visi lembaga, tantangan yang dihadapi, dan kebutuhan peserta didik (Halim & Fatoni, 2024). Kebijakan yang dipilih haruslah rasional dan mampu menjawab isu-isu prioritas dalam pengelolaan pendidikan.

Analisis kebijakan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bersifat reaktif semata, melainkan berdasarkan pertimbangan ilmiah dan partisipatif. Pendekatan ini menuntut adanya pengumpulan data, kajian dampak, serta keterlibatan berbagai pihak seperti guru, kepala madrasah, orang tua, dan bahkan peserta didik. Dalam praktik di madrasah, penerapan analisis kebijakan dapat terlihat dalam proses perumusan kebijakan kurikulum, strategi pembinaan karakter, hingga mekanisme evaluasi program pendidikan. Dengan begitu, kebijakan yang diterapkan lebih kontekstual, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan pendidikan secara komprehensif.

Secara keseluruhan, teori Thomas R. Dye menggarisbawahi pentingnya proses seleksi dan rasionalitas dalam pengambilan kebijakan publik, termasuk dalam sektor pendidikan madrasah (Halim & Mubarak, 2020). Kebijakan tidak boleh sekadar menjadi reaksi sesaat terhadap persoalan, tetapi harus berangkat dari analisis mendalam yang melibatkan data dan masukan berbagai pihak. Dengan menerapkan pendekatan analisis kebijakan secara sistematis, madrasah dapat menetapkan strategi pendidikan yang tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi perkembangan peserta didik dan lembaga..

Sintesis Teori

Berdasarkan kajian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan yang efektif dalam konteks madrasah harus bersifat partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan karakter serta mutu pendidikan. Keberhasilan kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tiga aspek utama: perumusan yang relevan dengan visi dan realitas madrasah, implementasi yang didukung oleh kapasitas manajerial dan sistem yang baik, serta evaluasi yang berkelanjutan.

Pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah memberikan landasan kelembagaan untuk mendorong otonomi dan partisipasi semua pihak dalam madrasah. Sementara itu, teori pendidikan karakter memberikan arah nilai-nilai moral dan spiritual yang harus menjadi bagian integral dari kebijakan (Halim, 2021). Di sisi lain, teori implementasi dan analisis kebijakan membantu dalam memahami proses kebijakan secara sistemik dan strategis. Dengan mengintegrasikan teori-teori tersebut, analisis terhadap kebijakan pendidikan di MTs As'ad Olak Kemang Kota Jambi dapat dilakukan secara komprehensif, mencakup dimensi normatif, operasional, dan evaluatif. Pendekatan ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana kebijakan dirancang, dijalankan, dan berdampak terhadap kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter siswa dalam konteks madrasah berbasis pesantren.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam lingkungan madrasah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni menggali dan menganalisis kebijakan pendidikan secara komprehensif. Menurut Creswell (dalam Fauziah dkk, 2024), pendekatan kualitatif merupakan suatu

proses untuk memahami realitas sosial berdasarkan perspektif partisipan, sedangkan Rukhmana dkk (2022) menyatakan bahwa deskriptif digunakan untuk mengungkap fenomena secara lebih terinci dan sistematis. Oleh karena itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan hasil penelitian yang kontekstual dan relevan dengan dinamika yang terjadi di MTs As'ad Olak Kemang Kota Jambi.

Setting penelitian dilakukan secara purposive, yakni dengan memilih MTs As'ad Olak Kemang Kota Jambi sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam aspek manajerial dan implementasi kebijakan pendidikan. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan dirancang, dilaksanakan, serta dievaluasi oleh berbagai pemangku kepentingan di lingkungan madrasah. Subjek dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, tenaga kependidikan, tata usaha, dan pihak lain yang dianggap memiliki informasi penting terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan di madrasah. Dalam pendekatan kualitatif, ukuran sampel tidak bersifat kuantitatif, melainkan mengedepankan kekayaan dan kedalaman informasi dari responden yang relevan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sarosa, 2021). Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti di lapangan, untuk mengamati dinamika kegiatan pendidikan secara alami (natural setting). Wawancara dilakukan secara tatap muka kepada kepala madrasah, guru, dan staf lainnya guna memperoleh informasi mendalam mengenai kebijakan dan praktik manajerial di madrasah. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pelengkap seperti foto kegiatan, arsip kebijakan, data jumlah siswa, serta dokumen lain yang mendukung keabsahan informasi. Ketiga teknik ini saling melengkapi dalam menggali data yang valid, komprehensif, dan kontekstual.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengikuti model Miles dan Huberman (2007), yang meliputi empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (verification). Proses analisis ini tidak hanya dilakukan setelah seluruh data terkumpul, melainkan berlangsung secara simultan sejak awal hingga akhir proses penelitian. Peneliti sebagai instrumen utama terlibat langsung dalam proses interpretasi data, mencermati pola-pola temuan di lapangan, serta menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, keseluruhan metode penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam, objektif, dan kritis terhadap praktik kebijakan pendidikan di MTs As'ad Olak Kemang.

PEMBAHASAN

Profil kebijakan pendidikan yang diterapkan di MTs As'ad Kota Jambi mencerminkan komitmen kuat lembaga dalam menciptakan sistem pendidikan yang seimbang antara pencapaian akademik dan pembentukan karakter. Berbagai kebijakan strategis dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan madrasah, majelis guru, dan pengurus pondok pesantren, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi mengakomodasi partisipasi semua unsur lembaga (Feisal et al., 2023). Kebijakan tersebut mencakup penguatan kurikulum nasional melalui integrasi dengan

kurikulum kepesantrenan, pembinaan karakter melalui pembiasaan nilai-nilai keislaman, penegakan tata tertib santri, pengelolaan guru dan staf secara profesional, serta implementasi sistem boarding school yang mendukung pembentukan kemandirian dan kedisiplinan siswa. Praktik pembelajaran terpadu yang memadukan materi umum dan keagamaan secara simultan menjadi contoh konkret dari pendekatan ini. Kurikulum nasional dilaksanakan seiring dengan pengajaran kitab kuning, hafalan Al-Qur'an, dan kegiatan ibadah harian, yang bertujuan untuk mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan sosial.

Proses implementasi kebijakan di MTs As'ad menunjukkan bahwa perencanaan yang baik disertai komitmen pelaksana mampu membentuk sistem pendidikan yang konsisten. Kepala madrasah, guru, dan wali asrama menjalankan peran sebagai agen pelaksana yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Penanaman kedisiplinan dilakukan melalui penetapan jadwal harian yang rinci dan ketat, mulai dari bangun tidur, kegiatan belajar, ibadah, hingga waktu istirahat malam. Jadwal tersebut bukan sekadar rutinitas, melainkan instrumen internalisasi nilai-nilai tanggung jawab dan ketertiban dalam kehidupan santri. Guna menjaga efektivitas pelaksanaan kebijakan, madrasah secara rutin mengadakan forum musyawarah mingguan yang melibatkan seluruh komponen lembaga, termasuk guru dan wali asrama. Forum ini digunakan sebagai ruang evaluasi dan penyusunan strategi perbaikan kebijakan yang bersifat partisipatif. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan seperti rapat wali santri juga menjadi indikator bahwa madrasah membangun pola komunikasi terbuka dengan pihak eksternal sebagai bagian dari sistem manajemen berbasis komunitas.

Tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tentu tidak dapat dihindari. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik manusia, sarana prasarana, maupun anggaran operasional. Data anggaran menunjukkan bahwa sejumlah program penguatan mutu harus tertunda karena belum tersedianya dana yang cukup. Masalah ini mendorong pihak madrasah untuk mengembangkan strategi kreatif, seperti menjalin kerja sama dengan pihak luar dan memaksimalkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Di sisi lain, tantangan juga muncul dari karakteristik peserta didik yang sangat beragam. Santri MTs As'ad berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya dan ekonomi yang berbeda. Guru dituntut untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang adaptif dan berkeadilan, termasuk pemberian layanan bimbingan konseling yang intensif. Dalam konteks ini, kepekaan sosial dan kemampuan interpersonal guru menjadi faktor penting agar kebijakan tidak diterapkan secara seragam, tetapi mampu menjawab kebutuhan spesifik setiap siswa dengan adil dan inklusif.

Evaluasi terhadap dampak kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan di MTs As'ad telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Capaian akademik siswa meningkat dalam tiga tahun terakhir, terlihat dari hasil ujian nasional dan ujian internal madrasah yang cenderung naik secara konsisten. Di luar aspek akademik, penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan nilai-nilai religius seperti program tahfidz, kajian kitab kuning, dan keterlibatan dalam kegiatan

sosial memberikan hasil yang positif terhadap pembentukan akhlak siswa. Praktik pembiasaan ini memperkuat kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial, sesuai dengan pandangan Lickona bahwa karakter terbentuk melalui pengulangan kebajikan dalam konteks nyata. Model pendidikan yang diterapkan tidak bersifat instruksional semata, melainkan transformatif, karena menysar perubahan pola pikir dan perilaku secara menyeluruh. Kebijakan yang berjalan di madrasah ini pada akhirnya mengintegrasikan pendekatan ilmiah dengan nilai-nilai spiritual dalam satu sistem pendidikan yang holistik.

Dari sudut pandang teori implementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier, kebijakan-kebijakan di MTs As'ad telah memenuhi dua komponen penting yaitu kejelasan tujuan dan efektivitas instrumen pelaksanaan. Namun demikian, faktor lingkungan eksternal seperti keterbatasan dana dan fasilitas masih menjadi penghambat yang signifikan. Dalam perspektif manajemen berbasis sekolah (MBS), keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam musyawarah kebijakan menjadi bukti bahwa MTs As'ad telah menerapkan prinsip otonomi, demokrasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola lembaga. Di sisi lain, penerapan nilai-nilai karakter yang berkelanjutan menunjukkan bahwa madrasah ini mengadopsi secara langsung prinsip-prinsip pendidikan karakter menurut Lickona, dengan menempatkan nilai moral sebagai inti dalam seluruh proses pendidikan. Keseluruhan praktik kebijakan yang ada di MTs As'ad menunjukkan adanya integrasi antara teori, kebutuhan lapangan, dan nilai-nilai lokal yang saling menguatkan, membentuk fondasi pendidikan yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan di MTs As'ad Kota Jambi berhasil diwujudkan melalui pendekatan yang terintegrasi antara nilai-nilai Islam, tata kelola partisipatif, serta sinkronisasi kurikulum nasional dan pesantren. Kebijakan tersebut tidak hanya tertuju pada pencapaian akademik, tetapi juga secara intensif mendorong terbentuknya karakter santri yang religius, disiplin, dan bertanggung jawab. Melalui pelibatan aktif seluruh komponen madrasah—termasuk guru, pengurus asrama, hingga orang tua—implementasi kebijakan berjalan secara menyeluruh dan kontekstual. Meskipun terdapat tantangan berupa keterbatasan fasilitas dan keberagaman latar belakang peserta didik, madrasah mampu menghadapinya dengan adaptasi, musyawarah rutin, serta inovasi yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan berbasis nilai dan pendekatan kolaboratif seperti di MTs As'ad memiliki potensi besar untuk direplikasi di madrasah lain, terutama dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia. Keberhasilan MTs As'ad dalam mengintegrasikan kurikulum nasional dan pesantren sekaligus menumbuhkan karakter santri secara konsisten dapat menjadi model pembelajaran bagi pengambil kebijakan, pengelola lembaga pendidikan, serta peneliti yang tertarik pada pengembangan pendidikan berbasis nilai. Temuan ini juga memperkuat pentingnya pendekatan kebijakan yang tidak hanya fokus pada struktur administratif, tetapi juga memperhatikan aspek kultural, spiritual, dan partisipatif sebagai kekuatan utama transformasi pendidikan.

REFERENSI:

- Feisal, F., Gani, R. A., & Halim, A. (2023). Eksistensi Yuridis Asas Kemutlakan HAM dan Maqasid Syariah pada Sanksi Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(2), 302–321. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1180>
- Firdaus, R., Nurbaiti, N., Halim, A., & Mubarak, Z. (2023). Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 22(1), 17–30. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.9416>
- Halim, A. (2020). *Konflik pendirian rumah ibadah & kearifan budaya lokal di Jambi*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Halim, A. (2021). Penanganan Konflik Agama Di Kota Jambi Berbasis Kebijakan Publik. *TAJ/DID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 20(2), 456–480. <https://doi.org/10.30631/tjd.v20i2.337>
- Halim, A. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Karakter. In *Indopress*.
- Halim, A., Anwar, U. S. K., & Maisah, M. T. (2019). The Analysis of Character Education Policy at State of Madrasah Aliyah Jambi Indonesia.”. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 4(12), 888–891.
- Halim, A., & Fatoni, I. (2024). Transformasi Pendidikan Perempuan Melalui Hukum Islam Pendekatan Integratif Berbasis Nilai Islami. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 5(02), 94–105.
- Halim, A., & Mubarak, Z. (2020). Pola Konflik Agama Di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Jambi. *TAJ/DID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(1), 85–109.
- Hartanto, W., & Halim, A. (2024). Stelionaat Crime from a Criminal Law Perspective and Islamic Criminal Law. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 3(1), 13–25. <https://doi.org/10.57235/ijrael.v3i1.2022>
- Iqbal, M., Panjaitan, A. Y., Helvirianti, E., Nurhayati, N., & Ritonga, Q. S. P. (2024). Relevansi Pendidikan Karakter dalam Konteks Pendidikan Islam: Membangun Generasi Berkarakter Islami. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3), 13–22. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.568>
- Mukhlis. (2024). Signifikansi dan Kontribusi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Siswa di Lingkungan Sekolah. *Integrated Education Journal*, 1(1), 22–42.
- Nasution, N. L., Lubis, D., & Faishal, M. (2024). Agama dan Perubahan Sosial Perspektif Mukti Ali. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(3).
- Purwananti, Y. S. (2016). Peningkatan Kualitas Pendidikan Sebagai Pencetak Sumber Daya Manusia Handal. *Proceedings International Seminar FoE (Faculty of Education)*, 220–229.
- Rohani, M., Attar, A., & Alimardi, M. (2021). A study of Hinduism being People of the book from the perspective of Imamiya. *Journal of Government and Civil Society*. <https://doi.org/10.22034/JRR.2021.262321.1815>.
- Ruslan, I., Aqil Irham, M., & . A. H. (2023). The 2024 Presidential Election: Contestation of Religious Ideology in Electoral Politics. *KnE Social Sciences*, 2023(2023), 392–406. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14056>
- Sapina, E., Arfan, A., Halim, A., Mubarak, Z., & Kailani, M. (2022). Mantra Agama: Islamic Dialectics and Local Beliefs of The Suku Anak Dalam Jambi. *Jurnal Studi Agama*, 6(2), 68–80. <https://doi.org/10.19109/jsa.v6i2.14975>
- Saputro, H. N. (2023). Inovasi Pelayanan pada Organisasi Publik. In *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik* (Vol. 26,

Issue 1). <https://doi.org/10.31845/jwk.v26i1.823>
Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.